

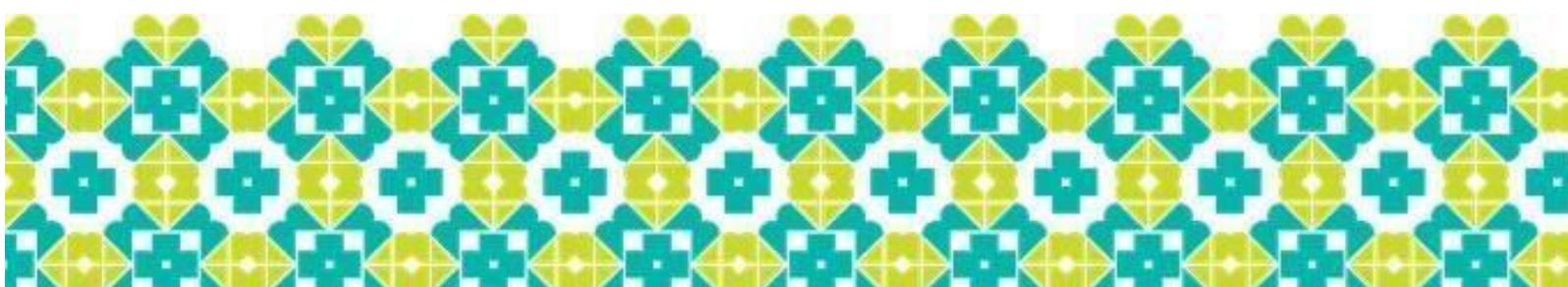


RENCANA KERJA

TAHUN 2024



BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN
KELAS I PALEMBANG



KATA PENGANTAR

Dengan Rasa Syukur atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa atas Berkat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Balai Kekeparantinaan Kesehatan Kelas I Palembang tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan yang bertujuan untuk Meningkatkan Pelayanan Kekeparantinaan di pintu masuk negara. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024, kami merasakan masih memiliki banyak kekurangan karena dukungan data yang belum memadai terutama data-data yang digunakan sebagai bahan analisis situasi, prioritas program/ kegiatan, dan upaya rencana.

Selanjutnya kedepan akan terus disempumakan dan disesuaikan dengan perkembangan kegiatan dipintu masuk negara. Diharapkan program dan kegiatan dalam RKT Tahun 2024 dapat dijadikan dasar dan acuan dalam melaksanakan upaya mencegah masuk keluarnya penyakit. Bagi Substansi/Sub Bagian dibawah Satuan kerja, diharapkan RKT 2024 dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Sasaran Kerja Pegawai.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berproses bersama dan mendukung tersusunnya Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024 ini, semoga dokumen ini dapat menjadi dokumen bersama dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan Dukungan Manajemen semoga bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, 4 Januari 2024

Ke p a l a,



Emmilya Rosa,SKM,MKM.

NIP. 197305251997032001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Struktur Organisasi 2

C. Sumber Daya Manusia 3

BAB II INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUNAN

A. Rencana Kinerja Tahunan 7

B. Sasaran Kegiatan RO dan Pendanaan 8

C. Rincian Kegiatan 9

BAB III PENUTUP

A. Pemanfaatan RKT 10

B. Pemantauan Pelaksanaan RKT 10

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pertanggung jawaban Renstra kepada masyarakat dapat dilihat dari dua jalur utama, yaitu jalur pertanggungjawaban keuangan dan jalur pertanggungjawaban kinerja. Rambu-rambu jalur pertanggungjawaban keuangan sudah tertata dengan apik, tetapi jalur pertanggungjawaban kinerja kurang tertata sehingga terkesan tidak perlu dipertanggungjawabkan.

Sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukan perencanaan kinerja menjadi suatu issue yang strategis yang harus diperhatikan dan dipecahkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi.

Perencanaan kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja (renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah target setting dari capaian indikator kinerja.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2024 merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang dalam periode tahunan dimana penyusunannya merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Rencana Pembangunan Nasional serta Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) ditetapkan target kinerja untuk setiap indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja

tersebut merupakan komitmen bagi satuan kerja yang harus tercapai dalam satu periode tahunan. Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen yang berisi informasi tentang target kinerja berupa keluaran dan atau dampak yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. Rencana Kerja Tahunan (RKT) menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dilingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Kementerian Kesehatan. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan, dicantumkan bahwa Struktur Organisasi yang terdiri dari:

1. Subbagian administrasi umum;
2. Instalasi;
3. Wilayah kerja;
4. Kelompok jabatan fungsional.

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang



1. Subbagian administrasi umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan.
2. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKK dapat dibentuk Wilker BKK yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal. Wilker BKK merupakan unit pelayanan nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala BKK. Wilker BKK dipimpin oleh koordinator yang dibantu tugasnya oleh pejabat fungsional.
3. Instalasi merupakan unit pelayanan nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala BKK.
4. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepala BKK sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan koordinator dan/atau sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi kepala BKK masing-masing.
Masing-masing kelompok jabatan fungsional dibagi tugas dalam 3 Substansi, yaitu :
 - a. Substansi Pengendalian Karantina Kesehatan dan Surveilans Epidemiologi
 - b. Substansi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah
 - c. Substansi Pengendalian Risiko Lingkungan

C. SUMBER DAYA MANUSIA

Pegawai BKK Kelas I Palembang per tanggal 31 Desember 2024 sebanyak 82 (delapan puluh dua) orang termasuk di wilayah kerja, yang terdiri dari 1 (satu) orang jabatan kepala kantor, 1 (satu) orang jabatan kasubbag, 67 (enam puluh tujuh) orang Jabatan Fungsional (JF), dan 12 (dua belas) orang Jabatan Pelaksana (JP). Adapun yang menjadi pejabat struktural saat ini adalah:

1. Kepala Kantor : Emmilya Rosa, SKM, MKM
2. Kasubbag Administrasi Umum : Heriyanto, ST, MKM

Pada tahun 2024 terdapat penambahan 10 Pegawai yang dilantik dalam jabatan fungsional sehingga menjadi 67 (enam puluh tujuh) orang pegawai Jabatan Fungsional (JF), dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1**Jenis Jabatan Fungsional BKK Palembang Tahun 2024**

No	Jenis Fungsional	Jumlah
1.	Analisis Kepegawaian Mahir (JF)	1
2.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda (JF)	1
3.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama (JF)	1
4.	Asisten Apoteker Mahir (JF)	1
5.	Asisten Apoteker Penyelia (JF)	1
6.	Asisten Apoteker Terampil (JF)	1
7.	Dokter Ahli Madya (JF)	3
8.	Dokter Ahli Muda (JF)	6
9.	Entomolog Kesehatan Ahli Madya (JF)	1
10.	Entomolog Kesehatan Ahli Muda (JF)	3
11.	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama (JF)	1
12.	Entomolog Kesehatan Mahir (JF)	1
13.	Entomolog Kesehatan Terampil (JF)	1
14.	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya (JF)	3
15.	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda (JF)	6
16.	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama (JF)	6
17.	Epidemiolog Kesehatan Mahir (JF)	1
18.	Epidemiolog Kesehatan Terampil (JF)	1
19.	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama (JF)	1
20.	Perawat Ahli Muda (JF)	1
21.	Perawat Mahir (JF)	5
22.	Perawat Penyelia (JF)	4
23.	Pranata Keuangan APBN Penyelia (JF)	2
24.	Pranata Komputer Ahli Pertama (JF)	1
25.	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda (JF)	1
26.	Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir (JF)	2
27.	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia (JF)	1
28.	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil (JF)	2
29.	Sanitarian Ahli Madya (JF)	1
30.	Sanitarian Ahli Muda (JF)	1
31.	Sanitarian Ahli Pertama (JF)	3
32.	Sanitarian Mahir (JF)	2
33.	Sanitarian Terampil (JF)	1
JUMLAH		67

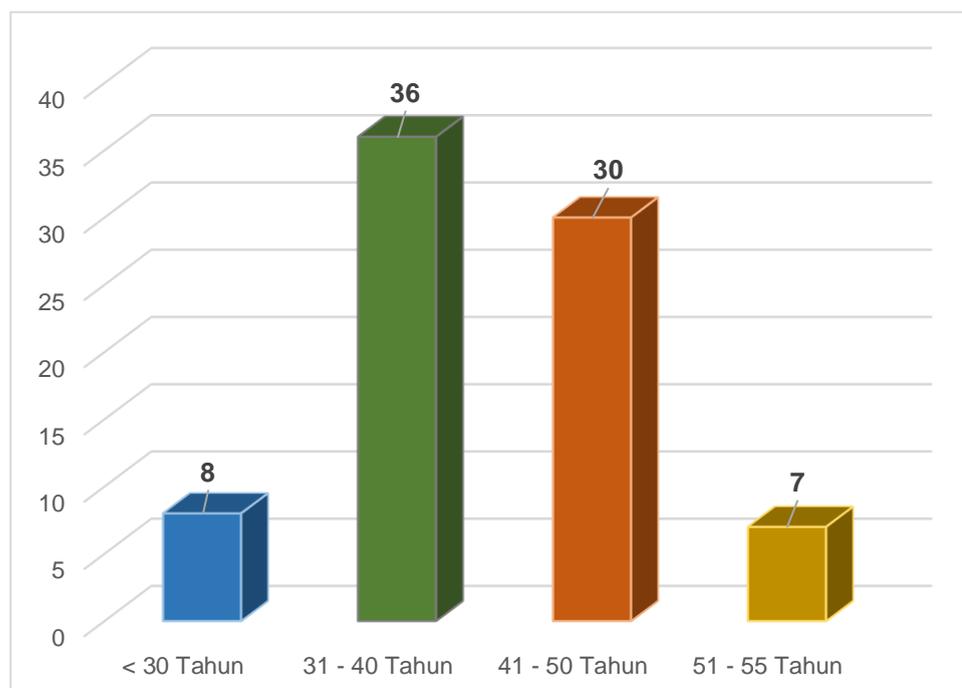
Pada tahun 2024 masih terdapat 12 (Dua Belas) pegawai yang memangku Jabatan Pelaksana, jabatan pelaksana tersebut, terdiri dari:

Tabel 1.2
Jenis Jabatan Pelaksana BKK Palembang Tahun 2024

No	Jenis Jabatan Pelaksana	Jumlah
1.	Arsiparis Ahli / Penyuluh Kearsipan (JP)	1
2.	Asisten Apoteker / Pengelola Kefarmasian	1
3.	Dokter	1
4.	Entomolog Kesehatan Ahli	2
5.	Epidemiolog Kesehatan Ahli	1
6.	Pengelola Barang Milik Negara	3
7.	Perencana/ Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	2
8.	Sanitarian Ahli/ Pemeriksa Sanitasi	1
JUMLAH		12

Jumlah pegawai Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang berdasarkan kelompok umur pada grafik di bawah ini dapat dilihat bahwa kelompok umur terbanyak diisi antara usia 31-40 tahun sejumlah 36 (tiga puluh enam) orang atau sebesar 44,44%.

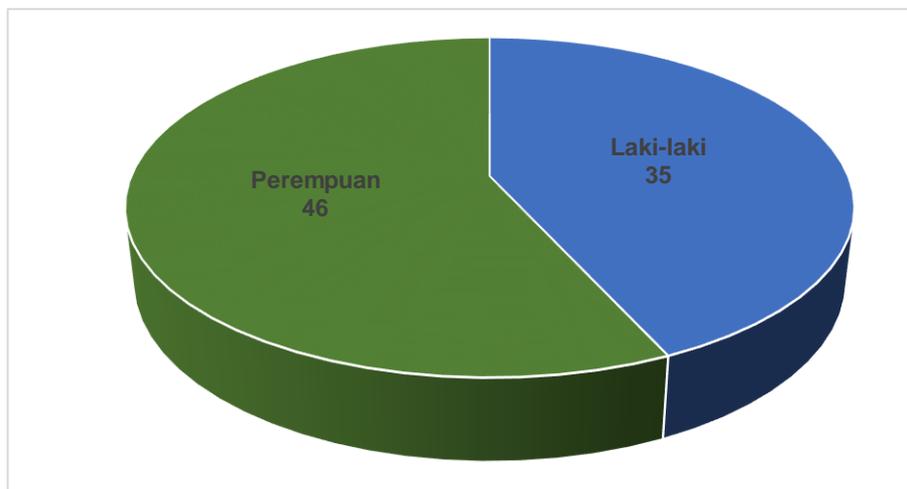
Gambar 1.2.
Jumlah Pegawai BKK Palembang Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2024



Jumlah pegawai Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang berdasarkan jenis kelamin pada grafik di bawah ini dapat dilihat bahwa komposisi terbanyak diisi oleh pegawai wanita sejumlah 46 (empat puluh enam) orang atau sebesar 56,79%.

Gambar 1.3.

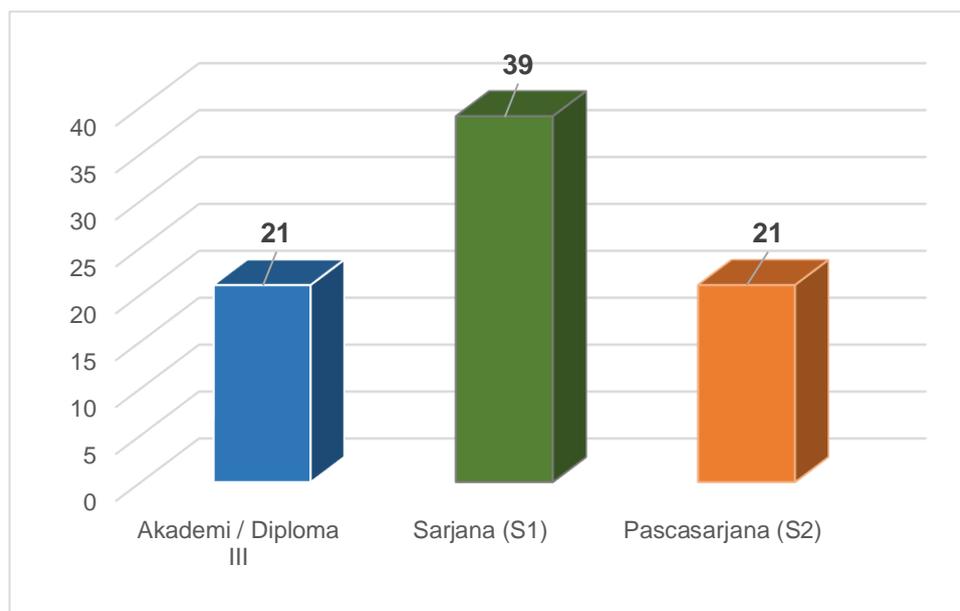
Jumlah Pegawai BKK Palembang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024



Jumlah pegawai Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang berdasarkan pendidikan pada Grafik 1.4 dapat dilihat bahwa komposisi terbanyak diisi oleh pegawai berpendidikan S1 sejumlah 39 (tiga puluh sembilan) orang atau sebesar 48,15%, sedangkan tingkat pendidikan pegawai dengan pendidikan Diploma III dan Pasca Sarjana berjumlah sama, yaitu 21 (dua puluh satu) Orang.

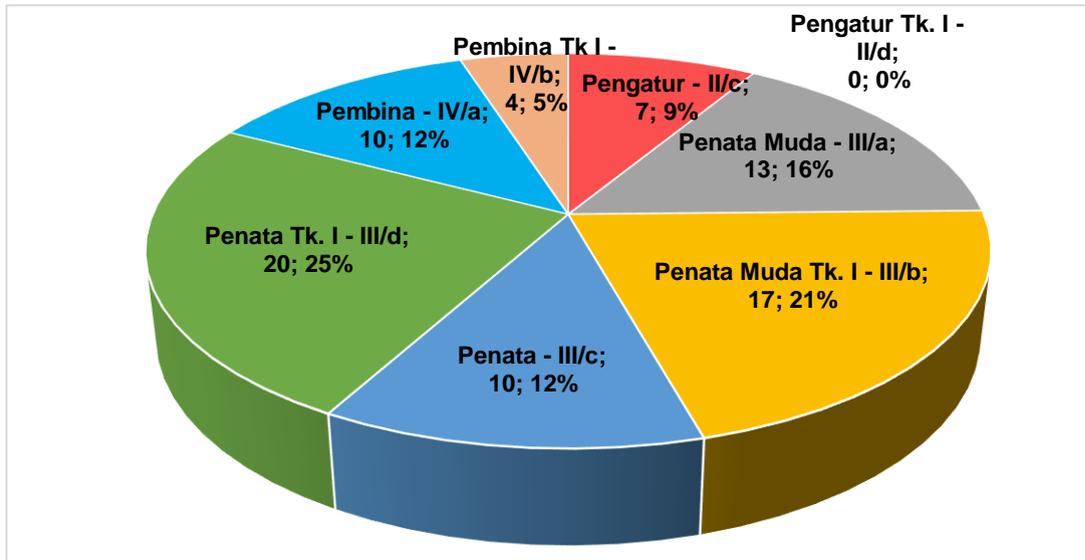
Gambar 1.4.

Jumlah Pegawai BKK Palembang Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024



Jumlah pegawai Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang berdasarkan golongan pada grafik berikut ini dapat dilihat bahwa komposisi terbanyak diisi oleh pegawai Golongan III sejumlah 60 (Enam puluh) orang atau sebesar 74,074%.

Gambar 1.5.
Jumlah Pegawai BKK Palembang Berdasarkan Golongan Tahun 2024



BAB II
INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUNAN

A. RENCANA KERJA TAHUNAN

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Kesehatan RI
Unit Organisasi	:	Balai Kekeparantinaan Kesehatan Kelas I Palembang
Program	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 2. Dukungan Manajemen
Sasaran Program yang didukung	:	<p>Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, peningkatan surveilans dan karantina kesehatan. b. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit Tular Vektor dan Zoonotik c. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung d. Menurunnya angka kesakitan dan angka kematian serta meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular <p>Program Dukungan Manajemen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit
Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Pelayanan Kekeparantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah 2. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Sasaran Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Pelayanan Kekeparantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah 2. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

B. SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) DAN PENDANAAN

Anggaran program, kegiatan, RO, dan pendanaan di BKK Kelas I Palembang tahun 2024 pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Program, Kegiatan, RO, dan Pendanaan di BKK Kelas I Palembang Tahun 2024

No	Rincian Output	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2024	Alokasi 2024 (000)
1	<ul style="list-style-type: none"> a. Layanan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan b. Koordinasi Pelayanan Kekearifanandi Pintu Masuk Negara dan Wilayah c. Layanan Survey Faktor Risiko Penyakit TBC d. Layanan Pemeriksaan Orang, barang, Alat Angkut e. Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit DBD f. Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Diare g. Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Malaria h. Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit PES i. Pelayanan Kesehatan di Pelabuhan/Bandara/Lintas Batas j. Pelayanan Kesehatan Haji k. Pengadaan Alat dan Bahan Kekearifan Kesehatan di Pintu Masuk 	Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN	0,91	4.317.681
2	<ul style="list-style-type: none"> a. Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit HIV b. Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria (HS) c. Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit DBD d. Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Diare 	Indeks pengendalian di pintumasuk negara	0,96	61.092
3	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi Lintas Program Lintas Sektor Evaluasi Program b. Layanan Hukum c. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal d. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan e. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi 	Kinerja implementasi WBKsatker	85	167.697
4	<ul style="list-style-type: none"> a. Layanan Perkantoran b. Layanan Sarana internal c. Layanan Umum 	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96	15.324.977
5	<ul style="list-style-type: none"> a. Layanan Manajemen Keuangan b. Layanan Pemantauan dan Evaluasi c. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 	Nilai Kinerja anggaran	87	233.153
6	<ul style="list-style-type: none"> a. Layanan Manajemen SDM b. Layanan Pendidikan dan Pelatihan c. Pelatihan Kesehatan 	Persentase ASN yang di tingkatkan kompetensinya	84%	554.053
7	<ul style="list-style-type: none"> a. Layanan Kegawatdaruratan dan Rujukan (Kategori II) b. Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Pada Situasi Khusus 	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	100%	251.300

o	Rincian Output	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2024	Alokasi 2024 (000)
	d. Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Bandar Udara e. Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Pelabuhan Penyeberangan			
8		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	95%	0
9		Persentase realisasi anggaran	96%	0

A. Rincian Kegiatan

1. Perhitungan Pendanaan (Tahun berjalan) dan Sumber Dana

Tabel 2.2
Perhitungan Pendanaan (Tahun Berjalan)

No	Rincian Output	Tahun 2024			Prakiraan Maju					
		Volume	Satuan	Alokasi (juta)	Volume			Alokasi (juta)		
					2024	2025	2025	2024	2025	2025
1	Koordinasi a. Koordinasi Lintas Program Lintas Sektor Evaluasi Program	2	Kegiatan	83.316	2 Kegiatan	2 Kegiatan	-	83.548	83.316	-
2	Layanan Dukungan Manajemen Internal a. Layanan Hukum b. Pelayanan Hubungan Masyarakat c. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal d. Layanan Umum e. Layanan Perkantoran f. Layanan BMN	23	Layanan	15.436.631	23 Layanan	23 Layanan	-	15.436.631	15.436.631	-
4	Layanan Manajemen SDM Internal a. Layanan Manajemen SDM b. Layanan Pendidikan dan Pelatihan	90	Orang	203.658	90 Orang	90 Orang	-	203.658	203.658	-
5	Layanan Manajemen Kinerja Internal a. Layanan Perencanaan dan Penganggaran b. Layanan Pemantauan dan Evaluasi c. Layanan Manajemen Keuangan d. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	15	Dokumen	249.968	15 Dokumen	15 Dokumen	-	249.968	249.968	-
6	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat a. Pelayanan Kesehatan Haji b. Pelayanan Kesehatan di Pelabuhan/Bandara/Lintas Batas	7428	Orang	782.490	7428 Orang	7428 Orang	-	782.490	782.490	-
7	Pelayanan Publik Lainnya a. Layanan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan b. Layanan Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut c. Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Pelabuhan Penyeberangan d. Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Bandar Udara e. Layanan Kesehatan Pada Situasi Khusus f. Layanan Pengendalian Vektor DBD g. Layanan Survei Vektor PES h. Layanan Pengendalian Vektor Diare i. Layanan Survei Vektor DBD j. Layanan Survei Vektor Malaria k. Layanan Survei Vektor Diare l. Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV m. Layanan Deteksi Dini Terduga TBC n. Layanan Kegawatdaruratan dan Rujukan (Kategori II) o. Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria (HS)	596	Layanan, bidang, dokumen	1.050.562	596 Layanan	596 Layanan	-	1.05	1.050.562	-
8	Sarana Bidang Kesehatan a. Pengadaan Alat dan Bahan Kekearifanaan Kesehatan di Pintu Masuk	6	Paket	2.835.278	6 Paket	6 Paket	-	2.835.278	2.835.278	-
9	Layanan Manajemen SDM Internal	34	Orang	350.395	34 Orang	34 Orang	-	350.395	350.395	-

2. Sumber Pendanaan

Tabel 2.3
Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan
Di Kantor BKK Kelas I Palembang Tahun 2024

Kode	Uraian	Anggaran
4815	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	15.973.573.000,-
4249	Dukungan Pelayanan Kekearifan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	5.080.548.000,-
	Jumlah	21.054.121.000

Tabel 2.4
Alokasi anggaran berdasarkan Sumber Dana
Di Kantor BKK Kelas I Palembang Tahun 2024

No.	Uraian	Alokasi
1.	Rupiah Murni	17.903.045.000
2.	PNBP	3.151.076.000
	Jumlah	21.054.121.000

BAB III

PENUTUP

A. Pemanfaatan RKT

Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini merupakan turunan dari Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024 di BKK Kelas I Palembang, sedangkan RKT ini berjangka waktu satu tahun anggaran pada tahun 2024. Rencana Kerja Tahunan memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategis pencapaiannya. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan. Indikator-indikator kinerja dari kegiatan berupa output dan indikator kegiatan berupa outcome ditentukan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya. Pada tahun 2024 BKK Kelas I Palembang akan melaksanakan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit guna mendukung pencapaian RAP Ditjen P2P.

Sesuai dengan dinamika penyelenggaraan program dimungkinkan dokumen perencanaan ini dilakukan review atau revisi yang bertujuan untuk efektifitas dan efisiensi kegiatan dan pencapaian sasaran. Berbagai kekurangan dan keterbatasan dalam dokumen perencanaan ini akan tetap diidentifikasi dan sewaktu-waktu dipergunakan untuk melakukan koreksi sesuai dengan kebutuhan.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) disusun untuk tahun 2024 yang dimanfaatkan sebagai berikut:

1. Pedoman dalam pelaksanaan program di BKK Kelas I Palembang untuk Tahun 2024
2. Sebagai acuan bagi BKK Kelas I Palembang untuk mencapai terget-target kegiatan yang akan dicapai dalam jangka pendek.
3. Sebagai sumber inspirasi bagi seluruh ASN di BKK Kelas I Palembang dalam meningkatkan kualitas kegiatan layanan kepada Masyarakat.
4. Sebagai tolak ukur bagi keberhasilan implementasi berbagai program peningkatan mutu layanan Kesehatan di BKK Kelas I Palembang.

B. Pemantauan Pelaksanan RKT

Dimaksudkan untuk mensinkronkan kembali keseluruhan proses kegiatan agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan dengan perbaikan segera agar dapat dicegah kemungkinan adanya penyimpangan ataupun ketidaksesuaian yang berpotensi mengurangi bahkan menimbulkan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Untuk itu, pemantauan diarahkan guna mengidentifikasi jangkauan pelayanan, kualitas pengelolaan, permasalahan yang terjadi serta dampak yang ditimbulkan darinya.

Pemantauan pelaksanaan Indikator Program di BKK Kelas I Palembang dilaksanakan secara:

1. Aplikasi

Secara Aplikasi Pemantauan program dilakukan secara periodek setiap bulan, dan dilakukan penginputan hasil pemantauan yang telah dilakukan rekapan dari masing-masing subbag

adminitrasi umum dan substansi.

- Aplikasi E-Monev DJA yang merupakan aplikasi Given dari Kementerian Keuangan, aplikasi ini mengevaluasi realisasi volume rincian output dan anggaran yang dilakukan setiap bulannya. Aplikasi E Monev DJA juga untuk melakukan pemantauan indikator Kinerja Anggaran yang akan dilaporkan setiap semester dan tahunan.
- Aplikasi E-Monev Bappenas yang merupakan aplikasi given dari Kementerian Bappenas, aplikasi ini untuk mengevaluasi setiap bulan Komponen dan Rincian Ouput Satker dan juga anggaran setiap Komponen kegiatan yang dilakukan setiap bulannya.
- Aplikasi E-Performance yang merupakan aplikasi given dari Kementerian Kesehatan, aplikasi ini digunakan untuk melakukan pemantauan capaian indikator perjanjian kinerja yang dilakukan setiap bulan.

2. Rapat Internal

Pemantauan secara internal dilakukan secara terpadu antara Kepala Kantor, Kasubbag ADUM dan Koordinator masing-masing substansi dan JFT/JFU. Pemantauan dilakukan secara periodik secara tri wulan dan semesteran melalui rapat internal lingkup BKK Kelas I Palembang. Sebelum dilakukan rapat pemantauan internal ke Subbag ADUM dan masing-masing substansi akan dikirimkan form capaian program kegiatan setiap bulan yang hasilnya akan dilakukan perekapan untuk mengetahui capaian dari indikator yang telah ditetapkan di awal tahun melalui Perjanjian Kinerja

Palembang, Februari 2024

Kepala Kantor



Eriandya Rosa SKM, MKM

NIP 197305251997032001

